



## Kinerja Keuangan dan Belanja Kota Pasuruan Tahun 2019-2023

Adinda Yasinta Nurul Hasan<sup>1</sup>, Aqilla Nabbiyah<sup>2\*</sup>, Berlian Gustina Riyadi<sup>3</sup>,  
Ferdiaz Riandra Febrilliant<sup>4</sup>, Renita Syilviana<sup>5</sup>, Mega Tunjung Hapsari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sayyid Ali  
Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

<sup>6</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah  
Tulungagung, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No. 46, Tulungagung, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [aqilla.nab@gmail.com](mailto:aqilla.nab@gmail.com)

**Abstract.** *The aim of this research will focus on the management of Regional Original Income and regional expenditure in Pasuruan City. Descriptive qualitative analysis methods will be used to explain the research results. Data obtained from the realization of Pasuruan City's financial reports for 2019-2023. The results of the analysis show that the degree of decentralization ratio has poor performance. The average performance financial independence ratio is very low. The average performance of the expenditure growth ratio is not good. Average operational expenditure performance is good. Average capital expenditure performance is good.*

**Keywords:** *Financial Performance, Pasuruan City, Income, Regional Expenditures.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah di Kota Pasuruan. Metode analisis kualitatif deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. Data diperoleh dari realisasi laporan keuangan Kota Pasuruan tahun 2019-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi kinerjanya kurang. Rata-rata rasio kemandirian keuangan kinerjanya sangat rendah. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja kinerjanya kurang baik. Rata-rata belanja operasional kinerjanya baik. Rata-rata belanja modal kinerjanya baik.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Kota Pasuruan, Pendapatan, Belanja Daerah.

### 1. LATAR BELAKANG

Dinamika belanja publik dan PAD Kota Pasuruan dari 2019 hingga 2023 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk pembangunan. Selama periode ini, proyeksi PAD telah meningkat, dengan kontribusi besar dari sektor pajak dan retribusi serta pendapatan transfer pemerintah pusat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja publik Kota Pasuruan dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun PAD meningkat, peningkatan belanja publik menunjukkan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah di desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antara PAD dan belanja publik serta memberikan saran untuk meningkatkan kebijakan keuangan daerah Kota Pasuruan

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menggambarkan seberapa jauh intervensi pemerintah dalam proses pembangunan serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. (Purba dan Hutabarat, 2017).

Semakin efektif pelaksanaan desentralisasi, semakin besar pula peningkatan pendapatan daerah. Derajat desentralisasi diukur melalui hubungan terbalik antara PAD dan total pendapatan daerah. Berdasarkan perhitungan:

$$DD = \frac{PAD}{TOTAL\ PENDAPATAN\ DAERAH} \times 100\%$$

Klasifikasi skala interval untuk menilai rasio derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:

- 1) 00,00% - 10,00%, menunjukkan kategori sangat rendah.
- 2) 10,01% - 20,00%, menunjukkan kategori rendah.
- 3) 20,01% - 30,00%, menunjukkan kategori cukup memadai.
- 4) 30,01% - 40,00%, menunjukkan kategori sedang.
- 5) 40,01% - 50,00%, menunjukkan kategori baik.
- 6) Lebih dari 50%, menunjukkan kategori sangat baik.

### Rasio Kemandirian Keuangan

$$KK = \frac{PAD}{Transfer\ Pusat + Provinsi + pinjaman} \times 100\%$$

Klasifikasi pada rasio kemandirian:

- a. 00,00% - 25,00%, artinya rendah sekali (intruktif)
- b. 25,01% - 50,00%, artinya rendah (konsultif)
- c. 50,01% - 75,00%, artinya sedang (partisipatif)
- d. >75%, artinya tinggi (delegatif)

### Analisis Belanja Daerah Kota Pasuruan

$$PB\ Th\ t = \frac{Belanja\ Th\ t - Belanja\ Th\ (t-1)}{Belanja\ Th\ (t-1)} \times 100\%$$

Penilaian analisis rasio pertumbuhan pendapatan :

- 1) Pertumbuhan belanja  $\leq$  pertumbuhan pendapatan, maka kinerja belanja = baik.
- 2) Pertumbuhan belanja  $\geq$  pertumbuhan pendapatan, maka kinerja belanja = kurang baik.

**Rasio Operasional Terhadap Total Belanja (BOTB)**

Rasio BOTB adalah indikator yang digunakan untuk membandingkan jumlah belanja operasional dengan keseluruhan belanja, biasanya dalam konteks pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan total belanja keseluruhan.

$$\text{BOTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Perbandingan belanja operasi antara 60% -90% dapat mempengaruhi total belanja daerah,

- 1) Jika Rasio BTOB  $\leq$  90%, maka kinerja belanja dianggap baik.
- 2) Jika Rasio BTOB  $\geq$  90%, maka kinerja belanja operasi dinilai kurang baik.

**Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (BMTB)**

$$\text{BMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio BMTB

- 1) Rasio BMTB  $>$  5%, Dengan kata lain, pengeluaran operasional berjalan dengan baik.
- 2) Rasio BMTB  $<$  5%, Dengan kata lain, pengeluaran operasional kurang optimal.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan dinamika pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja pemerintah di Kota Pasuruan. Analisis deskriptif sendiri merupakan suatu metode analisis data yang bertujuan untuk memaparkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara meluas atau umum.

Proses penelitian mencakup pengumpulan data sekunder yang berasal dari laporan pelaksanaan anggaran Kota Pasuruan tahun 2019 – 2023 yang didapat dari sumber tidak langsung, seperti informasi dan penelitian yang dilakukan terdahulu. Hasil analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman mengenai trend dan pola PAD serta pengeluaran pemerintah di Kota Pasuruan. Penelitian ini tidak hanya menyajikan informasi statis, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi fiskal suatu daerah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

**Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	PAD	Pendapatan	DD	Kinerja
2019	156.707.976	892.694.469	17,55%	Kurang
2020	145.036.603	809.671.940	17,91%	Kurang
2021	163.743.539	911.667.680	17,96%	Kurang
2022	131.837.446	839.305.467	15,70%	Kurang
2023	179.625.632	941.695.239	19,07%	Kurang
Rata rata	155.390.239,2	879.006.959	17,45%	Kurang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi Kota Pasuruan tahun 2019 - 2023 adalah “Kurang”. Rata rata PAD selama periode tersebut mencapai 155.390.239,2 sementara rata rata pendapatan total adalah 879.006.959 dengan rata-rata Derajat Desentralisasi tercatat sebesar 17,45% yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan dalam pengoptimalan PAD dan efisiensi desentralisasi di Kota Pasuruan.

##### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal (Rp)	KK (%)	Kinerja
2019	156.707.976	735.986.493	21,29%	Rendah sekali
2020	145.036.603	664.635.337	21,82%	Rendah sekali
2021	163.743.539	747.924.141	21,89%	Rendah sekali
2022	131.837.446	707.468.021	18,63%	Rendah sekali
2023	179.625.632	762.069.607	23,50%	Rendah sekali
<b>Rata-rata</b>	155.390.239,2	723.616.719,8	21,42%	Rendah sekali

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Pasuruan mengalami fluktuasi, dengan adanya peningkatan dan penurunan. Namun masih dalam kategori rendah sekali dengan presentase dari tahun 2019-2021. Kenaikan rasio kemandirian mengindikasikan adanya upaya yang cukup signifikan dari pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Meskipun terjadi peningkatan, namun rasio kemandirian masih dalam kategori sangat rendah dengan rata-rata kemandirian yang diperoleh sebesar 21,42%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kota Pasuruan masih sangat memiliki ketergantungan pada dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Penurunan rasio kemandirian pada tahun 2022 yaitu 18,63% menandakan bahwa terdapat kendala yang dihadapi Kota Pasuruan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

### Analisis Rasio Belanja Daerah

**Tabel 3. Analisis Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Belanja (%)	Kinerja
2019	863.005.971	-1,18 %	6,61%	Kurang Baik
2020	824.822.274	-9,30%	-4,42%	Baik
2021	858.584.017	3,65%	4,09%	Kurang Baik
2022	939.274.546	8,62%	9,39%	Kurang Baik
2023	1.010.778.968	3,29%	7,61%	Kurang Baik
Rata – rata	899.293.155,2	1,016%	4,66%	Kurang Baik

Sumber/Source: Badan Pengelola Dan Aset Kota Pasuruan/*Departement of Finance And Assetmanagement Of Pasuruan Municipality*

Berdasarkan pada tabel di atas dengan data yang disajikan, dapat dilihat adanya tren pertumbuhan pada pendapatan daerah Kota Pasuruan selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Kota Pasuruan dalam periode 2019–2023 cenderung "Kurang Baik" karena dalam banyak tahun pertumbuhan belanja melebihi pertumbuhan pendapatan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rasio Pertumbuhan Pendapatan 1,016% yang dimana itu lebih kecil dari pada nilai Pertumbuhan Belanja yaitu 4,66%.

### Analisis Rasio BOTB

**Tabel 4. Rasio BOTB Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Belanja operasi (Rp)	Total Belanja	BOTB (%)	Kinerja
2019	699.105.178	862.492.442	81%	Baik
2020	727.851.135	824.822.274	88,2%	Baik
2021	755.199.783	858.584.017	88%	Baik
2022	804.595.475	939.274.546	85,6%	Baik
2023	862.605.302	1.010.778.968	85,3%	Baik
Rata-rata	769.871.375	899.190.449	86%	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan tabel perhitungan rasio Operasional terhadap Total Belanja (BOTB) dapat disimpulkan bahwa tingkat operasional terhadap total belanja Kota Pasuruan tahun 2019 – 2023 adalah “Baik”. Rata – rata belanja operasi selama periode tersebut sebesar 769.871.375, sementara rata – rata total belanja sebesar 899.190.449. Dengan rata – rata rasio BOTB sebesar 86% yang kurang dari 90% selama periode tersebut. Dengan hal ini perlu dipertahankan dalam menjaga kinerja BOTB dan upaya untuk meningkatkan kinerja untuk kedepannya.

### Analisis Rasio BMTB

**Tabel 5. Rasio BMTB Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Kinerja
2019	163.194.768	863.005.971	18,91%	Baik
2020	76.128.830	824.822.274	9,22%	Baik
2021	93.025.830	858.584.017	10,83%	Baik
2022	129.718.487	939.274.576	13,81%	Baik
2023	146.450.796	1.010.778.968	14,48%	Baik
Rata – rata	144.683.877	875.060.874	13,45%	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja modal Kota Pasuruan secara menyeluruh dapat terlihat dari angka rasio BMTB yang selalu berada di atas 5% setiap tahunnya, bahkan rata-rata mencapai 13,45%. Dengan ini memperlihatkan bahwa alokasi belanja modal terhadap total belanja tetap berada dalam batas yang dianggap efisien dan menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah belanja modal dan total belanja setiap tahunnya.

## 5. KESIMPULAN SERTA MASUKAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan:

- 1) Berdasarkan rata-rata yang didapat rasio derajat desentralisasi Kota Pasuruan periode 2019-2023, kondisinya kurang memuaskan dengan persentase sebesar 17,45%.
- 2) Jika ditinjau dari rata-rata rasio kemandirian keuangan Kota Pasuruan dalam periode yang sama, hasilnya sangat rendah, yang menunjukkan bahwa Kota Pasuruan masih sangat mengandalkan aliran dana dari pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya.
- 3) Berdasarkan rata-rata rasio pertumbuhan belanja Kota Pasuruan selama tahun 2019-2023, kondisinya kurang baik karena pada banyak tahun pertumbuhan belanja melampaui pertumbuhan pendapatan.

- 4) Dari rata-rata belanja operasional kota Pasuruan selama 2019-2023, kondisinya dinilai baik, dengan rata-rata sebesar 86% yang berada di bawah ambang batas 90% selama periode tersebut.
- 5) Rata-rata belanja modal Kota Pasuruan, sebesar 13,45%, dinilai baik, karena alokasi belanja modal terhadap total belanja berada dalam batas efisiensi yang wajar. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menambahkan beberapa rasio yang lebih komprehensif guna memper dalam analisis. Penambahan rasio-rasio ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan daerah serta efektivitas pengelolannya. Studi ini berfokus Kota Pasuruan.

## DAFTAR REFERENSI

- Fakhrudin, I., Saputra, B. Y., & Firdaus. (2024). Pengaruh rasio derajat desentralisasi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 14(1). <https://online-journal.unja.ac.id> (Accessed 30 October 2024)
- Fathiyah, A. S., Majid, H., & Masnun. (2021). Analisis belanja daerah pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS*, 6(1), 117–122. <https://jmas.unbari.ac.id> (Accessed 30 October 2024)
- Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 1(1), 228–240.
- Rafsanjani, H., & Suharno. (2022). Analisis pengaruh belanja daerah DBH dan DAU terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics and Business*, 6(2), 722–727. <http://economis.unbari.ac.id> (Accessed 30 October 2024)
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Ramadhan, R., Pebrian, & Umiyati, E. (2021). Analisis belanja daerah dan faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bungo. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2). <https://online-journal.unja.ac.id> (Accessed 30 October 2024)
- Riswati, & Bukhori, Y. (2023). Analisis rasio keserasian belanja modal dan operasional serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah di pemerintahan daerah Kota Bandung. *JEKP*, 10(1), 41–55. <https://ejournal.ipdn.ac.id> (Accessed 30 October 2024)
- Runjung, K., Putra, R. M. R., Primastuti, A., & Riswanti. (2022). Analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111. <https://ejournal.idn.ac.id> (Accessed 24 October 2024)
- Selvi, M., & Hapsari, M. T. (2023). Kinerja pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 (Tahun 2017–2022). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 4(1), 205–114. <https://publikasi.dinus.ac.id> (Accessed 24 October 2024)

Sholikhah, L., Agustiyana, & Priyono, N. (2022). Analisis belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://journal.maranatha.edu> (Accessed 24 October 2024)

Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 3(2). <https://ejournal.stiejb.ac.id> (Accessed 30 October 2024)

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.